

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta
Email: ajamilwahab@yahoo.com

Abstract

Religious institutions have given much contribution to the society through fund management and social asset. One of the religious institutions is the Church (PAROKI) cathedral in Jakarta. Through the research with a qualitative approach, it is revealed this institution has implemented a system and mechanism for social religious funding management effectively and efficiently, with healthy, transparent and accountable management system. The distribution of collected funds, for the social activities carried out by the church, was done through the Social Section of the Paroki (SSP) or Social-Economic Development (PSE) in the form of charitable/consumptive aid, and the empowerment of education institutions under the Vincent association. The empowerment through the educational programs are considered successful, because it accomplishes the indicators of empowerment, while another program is merely a stimulant because it was charitable / consumptive.

Keywords: Jakarta Cathedral, religious social funds, people empowerment.

Latar Belakang

Semua agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha Hindu, dan Konghucu menempatkan kedermawanan sebagai salah satu ajaran penting. Namun demikian dalam kenyataannya masih ada kesenjangan yang mencolok antara cita dan fakta, seperti masih banyak orang miskin yang belum mendapat perhatian sesuai harapan.

Abstrak

Lembaga keagamaan telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui pengelolaan dana dan asset sosial. Salah satu lembaga keagamaan tersebut ialah Gereja (Paroki) Katedral di DKI Jakarta. Melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif diketahui bahwa lembaga ini telah menerapkan sistem dan mekanisme pengelolaan dana sosial keagamaan secara efektif dan efisien, dengan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan dan accountable. Penyaluran dana kolektif untuk kegiatan sosial oleh Gereja dilakukan melalui Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam bentuk bantuan karitatif/konsumtif, dan pemberdayaan lembaga pendidikan di bawah perhimpunan Vincentius. Pemberdayaan melalui program pendidikan ini bisa dikatakan berhasil, karena dapat memenuhi indikator-indikator dalam pemberdayaan, sementara program yang lainnya baru sebatas stimulan karena masih bersifat karitatif/konsumtif.

Kata Kunci: Katedral Jakarta, dana sosial keagamaan, pemberdayaan umat.

Untuk mengukur kemiskinan Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai kelompok miskin. Saat ini ditetapkan pemerintah bahwa pengeluaran

perkapita orang miskin perbulan adalah Rp. 211.726,-. Jika angka tersebut dijadikan patokan maka menurut BPS permaret 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 31,02 juta orang atau 13,33%. Hal ini menjadi persoalan sebab angka yang digunakan pemerintah dalam menetapkan garis kemiskinan tersebut tidak bisa diterima banyak pihak. Sangat tidak logis bila angka itu dijadikan patokan jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup perbulan masyarakat Indonesia saat ini. Angka tersebut adalah angka politis sebab jika diubah atau dinaikkan sedikit saja maka jumlah orang miskin menjadi meningkat. Jika dinaikkan misalnya menjadi Rp 450.000,- maka jumlah orang miskin menjadi dua kali lipat, padahal angka tersebut masih logis, karena orang yang memiliki pengeluaran dengan angka tersebut dipastikan juga belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perbulan sehingga masih layak disebut miskin.

Jika dilihat dari faktor penyebab tingginya angka kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah karena lemahnya etos kerja dan berusaha, lemahnya solidaritas di kalangan masyarakat, dan kurang berfungsiya lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi dan membantu masyarakat terutama si miskin. Meskipun saat ini banyak berdiri lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin, namun menurut laporan beberapa penelitian, dari aspek manajemen sistem pengelolaan di lembaga-lembaga sosial dan keagamaan tersebut dapat dikategorikan masih lemah. Lemahnya manajemen pengelolaan dana sosial di banyak organisasi keagamaan ini adalah karena beberapa faktor, yaitu : *Pertama*, kurangnya kesadaran para pemeluk agama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama sehingga pengumpulan dana tidak

maksimal. *Kedua*, lemahnya manajemen pengelolaan lembaga-lembaga agama dalam mengelola dana sosial keagamaan, sehingga berdampak pada kurangnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga kegamaan tersebut.

Lembaga keagamaan sesungguhnya telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, keagamaan, serta berbagai kegiatan lainnya telah bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Lembaga keagamaan telah terbukti berkontribusi nyata bagi terwujudnya kesejahteraan bangsa, memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan umat baik dari sisi sosial ataupun dari sisi ekonomi.

Salah satu lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana sosial keagamaan di DKI Jakarta adalah Gereja Katedral. Gereja milik umat Katolik ini memiliki peran dalam membangun komunitas umat beragama di DKI Jakarta dan sekitarnya, baik dalam hal keagamaan, pendidikan maupun sosial ekonomi. Hal ini tidak lepas dari adanya peran komunitas Katolik yang mempercayakan sebagian harta yang mereka miliki, untuk disumbangkan bagi kegiatan sosial keagamaan melalui Gereja Katedral.

Adalah sangat penting dilakukan penelitian terkait pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral di DKI Jakarta dan perannya dalam pemberdayaan umat. Hal ini penting guna mengidentifikasi model pengumpulan, pengelolaan, maupun pemanfaatan dana sosial keagamaan oleh lembaga tersebut dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan

pengelolaan dana sosial keagamaan ke arah yang lebih baik dan profesional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Dalam penelitian ini dibatasi pada peran Gereja Katedral sebagai paroki, bukan sebagai gereja Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: a) Bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral?; b) Apakah pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral telah berperan dalam memberdayakan umat Katolik?; c) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral dalam memberdayakan umat Katolik?

Penelitian ini bertujuan untuk: a) Mengetahui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral; b) Mengungkap peran lembaga sosial keagamaan Gereja Katedral dalam mengelola dana sosial keagamaan bagi pemberdayaan umat katolik; c) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral.

Kerangka Konseptual

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu dipahami yaitu istilah peran, pengelolaan dan pemberdayaan. Secara konseptual istilah tersebut masih bersifat umum, karena itu pengertian dan batasan masing-masing perlu terlebih dahulu diperjelas guna menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan konsep tersebut.

Peran

Secara bahasa M. Ali mengartikan peran sebagai suatu yang memegang pimpinan utama pada terjadinya suatu hal (Memiliki sikap dermawan dan mau membantu kaum lemah terdapat dalam ajaran semua agama (M. Ali, t.th:304). Pendapat lain mengatakan peranan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan (Bambang Marhiyanto, tt: 460). Menurut Wrightman seperti dikutip Subarman peranan merupakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan, dan dilakukan dalam situasi tertentu (Khaidarman Syah,1985:11). Kata lain memiliki arti sepadan dengan peran adalah partisipasi. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participate*", yang berarti mengambil bagian, dan berperanserta. Berger dan Luckmann (1972) mengatakan peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga.

Baratha (1982) menyebutkan bahwa berperan serta adalah mengikut sertakan faktor-faktor kecerdasan, minat, dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada dalam kelompok masyarakat (Krech, D, Crunthfild, RS dan Ballachey, EL, 1962: 169).

Dari beberapa pendapat di atas maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peran adalah keikut sertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan dan berfungsi ikut menentukan arah dan pencapaian suatu tujuan kegiatan tersebut.

Pengelolaan

Pengelolaan ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan pengelolaan dana sosial keagamaan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai nampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (Pranarka & Moeljarto. 1996:44). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas dasar sumber daya materi dan nonmateri.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri, untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266).

Sementara itu Ife memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi komunitas mereka (Ife Jim, 1995: 182).

Pengertian pemberdayaan umat beragama dapat diartikan sebagai proses transformasi dalam rangka penguatan diri atau kelompok masyarakat atau umat beragama dengan upaya penumbuhan kekuasaan atau kemampuan yang dilakukan melalui pemberian wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Upaya menumbuhkan umat beragama ini adalah dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengubah masa depan, dilakukan atas pilihan sendiri sehingga meningkatkan kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan mereka. Kondisi demikian pada akhirnya akan mengoptimalkan umat dalam pengamalan ajaran agama.

Gereja (Paroki) Katedral sebagai lembaga keagamaan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan bidang agama khususnya umat Katolik di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertanyaannya apakah eksistensi lembaga tersebut sampai saat ini telah sepenuhnya mampu menunjukkan performa seperti yang diharapkan masyarakat dalam hal pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan?

Penelitian ini berusaha menggali informasi mengenai bagaimana peran Gereja (Paroki) Katedral dalam pelaksanaan pengelolaan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat, yaitu melalui usaha membantu klien untuk memperoleh daya guna, mengambil keputusan, dan menentukan tindakan yang akan dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif, hasil kajiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah lembaga Gereja (Paroki) Katedral Jakarta.

Data dihimpun melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Data terdiri dari data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan sejumlah informan yaitu Pastor Kepala Gereja Katedral, dan beberapa pengurus gereja, Perhimpunan Vincentius dan lembaga pendidikan Vincentius. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, majalah, surat kabar, website

resmi Katedral dan Vincentius, dan surat-surat keputusan Gereja Katedral dan Perhimpunan Vincentius.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa data. Data yang telah diperoleh terlebih dahulu dikelompokkan, dikategorikan, dan dihubungkan antara satu data dengan lainnya, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Selanjutnya dilakukan analisis data yaitu mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data. Tujuan menganalisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan ditafsirkan, dan diambil kesimpulan.

Sekilas tentang Gereja Katedral

Gereja Katedral adalah salah satu tempat ibadat umat Katolik. Gereja ini terletak di Jalan Katedral, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sebenarnya, nama resmi gereja ini adalah "De Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming - Gereja Santa Maria Diangkat Ke Surga". Secara gamblang orang banyak yang menyebut gereja ini dengan nama Gereja Katedral saja. Gereja ini diresmikan tahun 1901, diresmikan dan diberkati oleh Mgr. Edmundus Sybrادرus Luypen, SJ, seorang Vikaris Apostolik Jakarta pada tanggal 21 April 1901. Dalam upacara peresmian tersebut banyak dihadiri para pejabat dan umat.

Gereja ini dibangun dengan gaya arsitektur neo-gotik dari Eropa. Gaya arsitektur ini memang sangat sering dipakai untuk membangun gedung-gedung gereja di masa lalu, gedung gereja yang kita lihat sekarang ini, bukanlah gedung gereja asli. Gedung Gereja Katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810. Tapi pada 27 Juli 1836, gedung gereja itu terbakar bersama dengan 180 rumah penduduk di sekitarnya. Jadi, gedung gereja itu dibangun kembali dan kemudian diresmikan pada tahun

1901. Yang mengagumkan ialah bahwa Badan Pengurus Gereja bersama umat dengan usahanya sendiri sanggup mengumpulkan seluruh biaya.

Pada tahun 1988 pernah dilakukan pemugaran untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan membersihkan lumut serta pengecatan ulang. Disamping itu juga dibangun gedung Pastoran dan gedung pertemuan yang baru dibagian belakang gereja. Pada 13 Agustus 1988, purnakarya pemugaran Gereja Katedral diresmikan oleh Bapak Soepardjo Roestam yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I, hadir mewakili Presiden Soeharto. Pada malam natal 24 Desember 2000, Gereja ini menjadi salah satu lokasi yang terkena serangan ledakan bom.

Gereja ini layak disebut Katedral, karena di dalamnya terdapat katedral, yakni Tahta Uskup Gereja Katedral pernah dikunjungi oleh Paus Paulus VI (1970) dan Paus Johannes Paulus II (1989) yang disambut oleh Mgr Leo Soekoto. Ibadat dirayakan dengan meriah oleh Paus Paulus VI bersama banyak Uskup di Katedral.

Gereja Katedral sendiri termasuk berada di bawah Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Dibawah KAJ kini ada 56 paroki, 5 rumah retre. Berdasarkan data tahun 2003 dari total penduduk Jakarta yaitu 11.279.332 jiwa, jumlah umat Katolik adalah 434.762 jiwa (Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005:103-111).

Perspektif Komunitas Katolik terhadap Dana sosial Keagamaan

Dalam pandangan ajaran agama Katolik berbagi adalah ungkapan cinta kasih, dan perintah utama Tuhan Jesus. Dalam Lukas 10: 27 disebutkan "Cintailah sesamamu manusia seperti

dirimu sendiri". Cinta itu harus lebih diwujudkan dengan tindakan dari pada kata-kata, dan letak cinta adalah dalam tindak saling member dari kedua pihak artinya yang mencintai memberi kepada yang dicintai seluruh atau sebagian dari milik atau kepunyaannya.

Dibalik ajakan untuk berbagi terdapat pemahaman bahwa apa yang dimiliki adalah anugrah Tuhan yang perlu disyukuri, dan digunakan untuk kesejahteraan diri dan sesama, khususnya orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Hak milik kita itu hak milik Tuhan juga sebenarnya, bukan hak milik mutlak kita, tapi hak milik yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita dan sesama.

Bagi umat Katolik sudah selayaknya berkat dan kasih yang diterima dari Allah itu dibagikan kepada sesama. Memberi kepada mereka yang membutuhkan, sangat penting dilakukan, karena Allah sudah terlebih dahulu memberi. (Wawancara dengan Yd, 40 tahun)

Pemasukan dan Pengelolaan Keuangan Gereja

Setiap hari Sabtu dan Minggu Gereja Katedral didatangi jemaat yang akan melaksanakan ibadat. Ibadat pada setiap hari Sabtu dan Minggu tersebut diikuti oleh 7 angkatan/rombongan jemaat. Pada hari Sabtu ada 2 rombongan jemaat, angkatan pertama dimulai sejak pukul 18.00 WIB. Sedangkan pada hari Minggu pelaksanaan ibadat terdiri dari 5 angkatan/rombongan jemaat yaitu pukul 07.30 wib, 09.00 wib, 10.30 wib, dan sore hari pukul 17.00 wib dan 19.00 wib. Jumlah umat Katolik yang melaksanakan ibadat di Gereja (Paroki) Katedral setiap minggunya sekitar 800 orang.

Pada saat melaksanakan ibadat tersebut umat Katolik memberikan derma

atau dana kolekte mingguan kepada gereja, disamping dana sumbangan. Besarnya dana kolekte yang dihimpun pada setiap ibadat sekitar Rp 7 juta s.d. Rp 10 juta, jadi jika rata-rata pengumpulan dana kolekte per-ibadat adalah Rp. 8.5 juta maka pada setiap minggunya dana kolekte yang terkumpul adalah sekitar Rp 59.5 juta.

Pemberian dana ke gereja juga dilakukan pada saat paskah, umat Katolik diharuskan berpuasa selama 40 hari, yakni mengurangi kecenderungan nafsu dunia. Umat Katolik biasanya mengurangi pengeluaran yang bersifat komsumtif dan menyisihkannya untuk kemudian diberikan kepada sesama yang membutuhkan melalui gereja. Untuk itu Gereja (Paroki) Katedral banyak menerima dana selama ibadat Paskah. Dana tersebut disebut Dana Puasa Pembangunan, yang relatif lebih besar dibanding dengan dana yang diperoleh gereja lewat ibadat mingguan.

Secara umum distribusi dana kolekte, dan untuk lebih memahami sistem pengelolaan keuangan tersebut, berikut beberapa penjelasan terkait sistem pengelolaan keuangan Gereja (Paroki) Katedral. Dana yang terhimpun kemudian dicatat dalam pembukuan gereja (Karya) dan Pembukuan Pastoran (Rumah Tangga). Sumber keuangan diperoleh dari Gereja/Paroki/Karya (Kolekte dan sumbangan) dan pastoran Rumah Tangga (Stipendia; Iura Stolae dan Honoraria Sumbangan).

Proses penghimpunan dana berasal dari pemasukan dan pengeluaran uang yang dibukukan oleh karyawan bagian keuangan. Kemudian Bendahara PGDP memeriksa dan mengoreksi laporan pembukuan. Sementara itu, Pengurus PGDP tiap semester (triwulan) dan akhir tahun melaporkan keadaan keuangannya ke KAJ. Tugas KAJ adalah memeriksa dan mengoreksi laporan (audit) pada waktunya. Gereja sebagai lembaga

memiliki ketentuan dan ketetapan yang diatur oleh keuskupan disebut paroki sehingga dan semua tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP).

Penghimpunan Dana

Kolekte Mingguan

Dalam waktu satu tahun ada kegiatan pengumpulan kolekte yang terbagi dalam sepuluh pos besar penerimaan dan peruntukannya. Kolekte Mingguan yang diterima Gereja (Paroki) Katedral sebanyak 5% diperuntukkan bagi pembinaan generasi muda, 25% untuk Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE), 40% untuk Dana Solidaritas Pastoral (DSP), dikirim ke Keuskupan dan 30% untuk Gereja/Karya Katedral.

Kolekte Kaum Muda

Dana ini sebesar 5% digunakan untuk mendukung kegiatan kaum muda. Kaum muda oleh gereja dihargai sebagai generasi yang akan melanjutkan karya-karya gereja, maka kaum muda perlu diperhatikan dan dipersiapkan.

Bentuk perhatian gereja diwujudkan dalam anggaran keuangan yang disediakan yaitu 5% dari kolekte mingguan. Anggaran yang disediakan oleh gereja diperuntukkan pada kegiatan yang bersifat kaderisasi atau pelatihan-pelatihan.

Kolekte SSP/PSE (25%)

Dana ini diperuntukkan bagi mereka yang sangat membutuhkan, karena kesulitan sosial dan ekonomi, dalam implementasinya antara lain diberikan untuk membantu membiayai lembaga pendidikan/Panti Asuhan

Vincentius, disamping itu juga digunakan untuk; beasiswa (pendidikan), kesehatan, karitatif, perbaikan perumahan, bantuan bencana, modal usaha kecil dan lain sebagainya.

Kolekte Gereja (30%)

Dana ini untuk membiayai kegiatan kehidupan menggereja di Katedral yaitu gaji karyawan, kendaraan/transport, listrik, air, telephon, majalah, keorganisasian, kesekretariatan, seksi dan kelompok-kelompok, kesehatan, perawatan bangunan dan lain-lain.

KAJ /Dana Solidaritas Pastoral (40%)

Dana ini (40%) disetor ke Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) untuk Dana Solidaritas Pastoral (DSP), diperuntukkan bagi bantuan paroki-paroki miskin, mobilitas Kendaraan paroki, Membeli tanah persiapan gereja dan Membangun gedung gereja.

Pastoran

Para pastor hidup dan tinggal di Pastoran. Para Pastor bekerja untuk Gereja, maka hidupnya menjadi tanggungan umat yang dilayani, yaitu dalam wujud sumbangan uang natura (berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok). Sementara itu, kehidupan rumah tangga pastoran ditopang oleh umat sebesar 50% dari stipendia dan iuran stolae. Juga berupa sumbangan in natura (dalam bentuk barang; seperti misalnya makan siang).

Stipendium adalah sumbangan yang diberikan oleh umat beriman untuk misa yang dipersembahkan imam untuk ujud atau intense tertentu. Sedangkan iura stolae adalah sumbangan umat beriman kepada imam yang menerima Sakramen atau pelayanan pastoral

lainnya. Honoraria adalah honor yang diberikan oleh umat kepada imam dalam pelayanan non-sakramen (ceramah, seminar, dll)

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa Gereja (Paroki) Katedral menerima dana umat yang berasal dari kolekte derma yang dikumpulkan ketika umat Katolik menjalankan ibadat dan sumbangan. Dana tersebut kemudian didistribusikan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh keuskupan. Dari dana yang terkumpul, sebagian ada yang digunakan untuk kepentingan Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial ekonomi (PSE) yaitu sebesar 25% dari total dana kolekte.

Bantuan karitatif/konsumtif

Sejauh ini SSP dan PSE telah memanfaatkan dana tersebut untuk membantu masyarakat yang tidak mampu melalui bantuan yang bersifat karitatif (konsumtif) yaitu memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang tidak mampu, saat ini jumlah yang menerima bantuan sekitar 40 orang dalam setiap bulan. Kepada mereka diberikan bantuan dalam bentuk uang yang besarnya antara Rp 300.000 sampai Rp. 400.000 .

Bantuan Produktif

Disamping bantuan yang bersifat karitatif di atas juga terdapat beberapa program kegiatan yang bersifat produktif, antara lain untuk program beasiswa, kesehatan, perbaikan rumah, dan perbaikan tempat usaha. Dana SSP dan PSE juga dimanfaatkan untuk membantu perhimpunan Vincentius yang mengelola beberapa panti asuhan dan sekolah.

Perhimpunan Vincentius

Perhimpunan Vincentius Jakarta didirikan pada tanggal 29 Agustus 1855 dengan nama Dana Bantuan Santo Vincentius a Paulo Di Batavia (pada tahun 1909 diubah menjadi Batavia's Vereeniging) oleh beberapa orang Katolik seperti Mgr. PM. Vrancken (Vikaris Apostolik Djakarta), Pastor Van der Grinten (Notaris JR. Klein, PA Toillez dan E. Van Polanen Petel). Notaris J.R. Kleijn yang menyiapkan akta pendirian dan memperoleh pengakuan dari pemerintah (1856), menjadi presiden pertama (1856-1859). Tujuan utama saat itu adalah membantu anak-anak keturunan Belanda (Indo-Eropa) yang menjadi masalah sosial di masyarakat. Usaha sosial ini awalnya lebih bersifat home-care, karena Perhimpunan Vincentius Jakarta belum memiliki rumah.

Pada bulan April 1862 barulah diperoleh sebuah rumah sewa di Bazaar Baroe (sekarang Pasar Baru) yang hanya mampu menampung sekitar 25 anak puteri. Pada bulan April 1864 karena kekurangan biaya, masa sewa rumah tersebut tidak dapat diperpanjang. Syukurlah para Suster Ursulin bersedia menampung mereka di Biara Ursulin. Akhirnya pada tahun 1885 didirikan rumah khusus di Jalan Pos untuk menampung anak-anak itu. Bulan Nopember 1893 diperoleh rumah di Gang Kurni (sekarang jalan Kwini), yang menampung 29 anak putera yang diasuh oleh para Pastor Jesuit (SJ).

Baru pada tahun 1910 sebuah rumah bisa dibangun di Jalan Kramat Raya No.134 Jakarta. Inilah permulaan berdirinya Kompleks Kramat Raya seperti sekarang ini. Maka mulailah anak-anak puteri maupun anak-anak putera dari kedua rumah terdahulu menempati rumah milik sendiri. Para Suster Ursulin yang telah mengurus mereka selama 46 tahun, ikut pindah ke Kramat Raya. Sesudah itu jumlah anak-anak bertambah terus.

Tahun 1929 tugas para Pastor Jesuit dalam hal pendidikan anak-anak putera dialihkan kepada para Pastor Fransiskan (OFM) hingga sekarang. Bulan Oktober 1939, setelah berkarya di Kramat selama 28 tahun, para Suster Ursulin akhirnya pindah ke Bidaracina. 300 anak puteri bersama dengan 12 suster pindah dari kompleks Kramat ke rumah baru di Jalan Otto Iskandardinata 76, yang kini dikenal dengan nama Panti Asuhan Vincentius Puteri. Sedangkan anak putera tetap menempati kompleks Kramat, kini disebut Panti Asuhan Vincentius Putera.

Tahun 1942-1945 keadaan menjadi kacau karena dalam masa penjajahan Jepang, para Pimpinan Panti, baik Pastor, Bruder maupun Suster Belanda masuk ke kamp-kamp tahanan. Sedangkan perumahannya digunakan oleh serdadu Jepang sebagai markas. Sementara anak-anak asuh dititipkan di Biara Ursulin dan diasuh oleh Suster-Suster Ursulin.

Atas permintaan Pemerintah Indonesia, pada tanggal 30 Juni 1947 Perhimpunan Vincentius Jakarta mendirikan Panti Asuhan Desa Putera. Tujuannya untuk menampung anak-anak terlantar dan anak-anak gelandangan korban perang kemerdekaan. Panti ini diperlakukan kepada Bruder Budi Mulia (BM) dan menempati rumah di kompleks Srengseng Sawah, Pasar Minggu.

Batavia's Vincentius Vereeniging secara resmi diubah menjadi Perhimpunan Vincentius Jakarta pada tanggal 31 Maret 1950. Sejak itu Panti Asuhan Vincentius memberi prioritas pelayanan kepada anak-anak yatim piatu dan terlantar, setelah itu barulah anak-anak yatim atau piatu maupun anak-anak dari keluarga *broken home* serta penyandang masalah sosial lainnya (anak dari keluarga retak/miskin/sakit).

Tahun 1972 Perhimpunan Vincentius Jakarta mendirikan rumah panti keempat, yakni Panti Asuhan

Pondok Si Boncel di Jalan Raden Saleh Raya No.7. Panti ini khusus menampung anak-anak balita (bawah lima tahun). Pengelolaannya dipercayakan kepada para Suster Dominikanes (OP). Dengan semakin bertambahnya jumlah anak asuh dan terbatasnya daya tampung panti, maka pada tanggal 1 April 1981 Panti Asuhan Pondok Si Boncel pindah ke kompleks baru di Srengseng Sawah Pasar Minggu, yang lebih luas serta memadai.

Visi dan Misi

Gereja Katedral memiliki visi "Membentuk manusia Indonesia mandiri, yang beriman, berakhhlak tinggi, berbudi pekerti luhur dan berpendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia". Sedangkan misinya yakni: a) Melaksanakan salah satu karya sosial Keuskupan Agung Jakarta yaitu mengasuh, mengajar dan mendidik anak yatim piatu, yatim, piatu, terlantar dan anak lain yang membutuhkannya dengan meneladani kehidupan Kristus dalam terang Iman Katolik; b) Menyelenggarakan kegiatan sosial yang sah dan tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Perhimpunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi



Panti Sosial

Panti Asuhan Vincentius Putera

Panti Asuhan Vincentius Putera beralamat di Jl. Kramat Raya 134, Jakarta memberi prioritas pelayanan kepada anak-anak yatim piatu dan terlantar, setelah itu barulah anak-anak yatim atau piatu maupun anak-anak dari keluarga *broken home* serta penyandang masalah sosial lainnya (anak dari keluarga retak/miskin/sakit). Di lembaga ini disamping terdapat asrama putra juga disediakan pendidikan untuk para penghuni panti mulai tingkat SD, SMP, dan SMK.

Panti Asuhan Vincentus Puteri

Panti Asuhan Vincentius Putri beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No.76, Jakarta Timur juga memberi prioritas pelayanan kepada anak-anak yatim piatu dan terlantar, anak-anak yatim atau piatu maupun anak-anak dari keluarga *broken home* serta penyandang masalah sosial lainnya (anak dari keluarga retak/miskin/sakit). Di lembaga ini remaja putri dididik dan diasramakan. Lembaga ini juga membuka pendidikan tingkat SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat SLTA para penghuni panti biasanya bersekolah di luar.

Panti Asuhan Desa Putra

Panti Asuhan Desa Putra kini beralamat di jl. Desa Putera No. 24, Srengseng Sawah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan membuka pendidikan dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Kini Desa Putera diakui sebagai SMK Grafika terbaik dengan percetakan modern yang menghasilkan cetakan bermutu. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal dilatih dalam *Graphic Training Centre* (1993). Usaha lain adalah klinik sederhana untuk anak-anak asrama (1956), yang kemudian menjadi poliklinik

(1970) untuk umum juga, yang dikelola oleh yayasan Melania sejak 1973, kini (sejak 1992) dikelola oleh yayasan Budi Mulia sebagai Balai Kesehatan Masyarakat dengan dokter dan perawat.

Panti Asuhan Pondok Si Boncel

Panti Asuhan Pondok Si Boncel beralamat di Jl. Desa Putera No. 5 Rt.01/06 Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta didirikan untuk mengurus secara khusus anak-anak yatim piatu yang masih di bawah umur 7 (tujuh) tahun. Para anak-anak yatim tersebut mendapat perawatan dan pendidikan dari Panti Asuhan. Kini di Panti Asuhan Pondok Si Boncel juga terdapat sekolah TK yang dimanfaatkan oleh penghuni panti juga dari luar panti.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara umum dalam upaya pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja (Paroki) Katedral terdapat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung dan penghambat. Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung adalah; a) Nilai dan ajaran Katolik yang mendorong sebagian umat Katolik untuk mau berderma. Menyadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan yang perlu disyukuri, dan digunakan untuk kesejahteraan diri dan sesama, khususnya orang miskin yang membutuhkan pertolongan; b) Ketetapan keuskupan sangat jelas tentang persentase pembagian dana kolekte untuk kegiatan sosial yaitu 25% sehingga memudahkan gereja dalam mendistribusikan/memanfaatkan dana kolekte melalui SSP/PSE; c) Letak geografis Gereja Katedral yaitu di tengah kota Jakarta Pusat.

Adapun hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai faktor penghambat diantaranya; a) Masih rendahnya kesediaan sebagian jemaat gereja dalam

memberikan dana kolekte, hal tersebut tidak seimbang jika dibanding dengan gaya hidup sebagian mereka yang cenderung mewah, misalnya ketika melangsungkan perkawinan, maka biasanya mampu menyelenggarakannya dengan biaya yang relatif besar; b) Jumlah masyarakat kurang mampu di DKI Jakarta cukup besar, sedangkan dana yang dimiliki gereja terbatas, sehingga bentuk bantuan yang dipilih adalah yang bersifat karikatif karena cakupannya bisa lebih luas, akibatnya hanya sebagian kecil saja dari masyarakat kurang mampu yang dapat dibantu dengan program pemberdayaan.

Penutup

Penulis menyimpulkan beberapa hal berikut: a) Gereja (Paroki) Katedral sebagai pengumpul dan pengelola dana kolekte umat Katolik, telah memilih sistem dan mekanisme pengelolaan dana sosial keagamaan secara efektif dan efisien, dengan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan dan *accountable*. Pelaporan juga dilakukan secara periodik kepada Keuskupan Agung Jakarta. Bagi umat Katolik dan pihak lainnya terbuka untuk mengakses laporan tersebut; b) Proporsi penyaluran dana kolekte oleh Gereja telah ditetapkan Keuskupan yaitu Dana Kepemudaan 5%, Dana Papa 25%, Dana KAJ 40%, dan Dana Paroki 30%. Adapun untuk kegiatan sosial yaitu Dana Papa disalurkan melalui SSP/PSE dalam bentuk program bantuan karikatif/konsumtif, dan pemberdayaan

melalui bidang pendidikan dengan memberikan bantuan ke lembaga di bawah perhimpunan Vincentius; c) Pemberdayaan oleh Gereja (Paroki) Katedral baru berhasil pada program pendidikan, karena telah memenuhi indikator dalam pemberdayaan, yaitu adanya proses transfer daya terhadap masyarakat sasaran dalam meningkatkan keswadayaan, peningkatan kemampuan kelompok sasaran dengan daya yang dimiliki untuk mampu menentukan pilihan hidupnya. Adapun program bantuan ekonomi, bantuan yang diberikan baru sebatas memperbaiki rumah/warung tempat usaha, belum ada pendampingan dan pemberian modal. Indikator pemberdayaan belum terlihat dan belum bisa diukur, karena program ini baru sebatas stimulan.

Sebagai rekomendasi, dapat disebutkan beberapa hal berikut: a) Internalisasi ajaran berderma kepada seluruh umat Katolik hendaknya lebih diintensifkan, sehingga dapat meningkatkan pemberian bantuan melalui gereja kepada masyarakat yang tidak mampu; b) Penyaluran/pemanfaatan dana sosial keagamaan (kolekte) oleh Gereja (Paroki) Katedral sudah berjalan berupa bantuan yang bersifat karikatif dan bantuan di bidang pendidikan agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

Pada program pemberdayaan ekonomi umat hendaknya disediakan pendampingan ekonomi disertai pemberian modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2010. *Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi dan Sosial*.
- _____, 2006. *Regulasi dan Implementasi Perda Zakat*.

- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. 2005. *Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia 2005*.
- Dermawan, B. Hardijantan, Sr. Magdalena Rini, et.al. 2010. *Mari Berbagi, Perjalanan Rohani Menanti Kebangkitan*. Sekretariat Komisi PSE/APP-KAJ Bekerja Sama dengan LDD-KAJ dan Komisi PSE-KWI.
- Ife, Jim. 1995. *Community development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Australia, Longman Pty Ltd.
- Khaidarman Syah, *Fungsi dan Peranan Widya Iswara Studi Kasus pada Diklat X*, 1995, Jakarta. Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Krech, D, Crunthfild, RS, and Ballachey, EL, 1962, *Individual in Society: a Sextbook of Sosial Psychology*, Calofornia: Mo Grow, Hiel Kagohusha, LTD.
- Payne. 1997. *Modern Sosial Work Theory*.
- Pranarka & Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. CSIS.